

Orientasi Bernegara Republik Indonesia Periode 1959-1965

Luluq Istiqomah¹, Henry Susanto², Rinaldo Adi Pratama³

FKIP Unila Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 01 Bandar Lampung

E-mail: luluqistiqomah@gmail.com

Abstrac - State Orientation Of The Republic Of Indonesia For The Period 1959-1965. *The failure of parliamentary democracy or liberal democracy makes Indonesian government unstable. The liberal democracy system with the multiparty drive was inspired by one of the systems that prevailed in the Netherlands. This indicates that Indonesia was not free from the influence of colonialism and imperialism, making sukarno the President of the time look for solutions to problems in liberal democracy and for other alternatives to living Indonesian life far from the influence of colonialism and imperialism. Guided democracy to be the solution to the failure of liberal democracy in Indonesia at the time. Since then, historical phenomena in the republic of Indonesia have begun to travel to China. The Chinese country's development model is believed by Sukarno as an alternative Indonesian modernization road that is in the middle of the cold war between the Soviet Union and the United States. The study is a study that uses a qualitative approach with historical methods. Researcher uses literature techniques and documentation techniques in data collection. Based on research and discussions, the author has concluded that the guided democracy is that Sukarno as president has anti-imperialism and colonialism. This can be seen from the growing political behavior of external factors and on that point China inspired the pointing of sukarno to China in the face of the failure that the liberal democracy was under, especially with the fact that liberal democracy is still gaining influence from the Netherlands. Sukarno then applied guided democracy and nasakom as alternatives to the failure of liberal democracy, That would be an adverse risk for the Indonesian nation itself, like the seclusion from the international world and the dejected economy of Indonesia and the early G30S event that led to the advent of the Sukarno demotion.*

Keywords : *China, Guided Democracy, President Sukarno.*

Abstrak - Orientasi Bernegara Republik Indonesia Periode 1959-1965. Kegagalan demokrasi parlementer atau demokrasi liberal menjadikan pemerintahan Indonesia tidak stabil. Sistem demokrasi liberal dengan multipartai yang dijalankan diinspirasi salah satunya dari sistem yang berlaku di Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia belum lepas dari pengaruh kolonialisme dan

imperialisme menjadikan Sukarno sang Presiden kala itu mencari solusi atas masalah dalam demokrasi liberal dan mencari alternatif lain dalam menjalankan kehidupan bernegara Indonesia yang jauh dari pengaruh kolonialisme dan imperialisme. Demokrasi terpimpin menjadi solusi dari gagalnya demokrasi liberal di Indonesia saat itu. Sejak saat itu fenomena sejarah bernegara Republik Indonesia mulai berkiblat ke negara Cina. Model pembangunan negeri Cina diyakini oleh Sukarno sebagai jalan alternatif modernisasi Indonesia yang berada di tengah pusaran Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis. Peneliti menggunakan teknik kepustakaan dan teknik dokumentasi dalam pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis mengambil kesimpulan bahwa faktor penyebab diterapkan demokrasi terpimpin adalah Sukarno sebagai presiden memiliki perkembangan anti imperialisme dan kolonialisme. Hal ini dapat dilihat dari perilaku politiknya yang tumbuh dari faktor eksternal dan berkenaan dengan hal itu Cina memberikan inspirasi saat kunjungan Sukarno ke Cina ditengah kegagalan yang sedang dialami saat pelaksanaan demokrasi liberal, terlebih dengan kenyataan bahwa demokrasi liberal masih mendapatkan pengaruh dari Belanda. Sukarno kemudian menerapkan Demokrasi terpimpin dan Nasakom sebagai alternatif dalam kegagalan demokrasi liberal, hal tersebut justru menimbulkan risiko yang merugikan bagi bangsa Indonesia itu sendiri seperti keterasingan dari dunia Internasional dan terpuruknya ekonomi Indonesia serta peristiwa G30S yang menjadi bibit penggembosan Sukarno.

Kata Kunci : *Presiden Sukarno, Demokrasi Terpimpin, Cina.*

 © 2021 JIPS; published by Jurusan IPS, FKIP Unila.. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 License.

The article is published with Open Access at <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/jips>

1. PENDAHULUAN

Indonesia memasuki periode demokrasi liberal sejak tahun 1950, yakni ketika terjadi kompromi politik antara pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950. Keduanya menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan untuk sementara menggunakan konstitusi buah kompromi antara Undang-Undang RIS dan Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut Undang-Undang Dasar tahun 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) (Subkhan, 2018: 22).

Masa demokrasi liberal ini ditandai oleh menjamurnya partai-partai politik yang saling berkompetisi satu sama lain dalam meraih simpati rakyat dan mencapai kekuasaan politik (Suradi *et al.*, 1986: 101-102). Ricklefs (2005: 480) mengatakan bahwa sistem demokrasi liberal dalam bentuk multipartai yang dijalankan tersebut diinspirasi salah satunya dari sistem yang berlaku di Belanda. Jadi, kabinet bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dianggap sebagai representasi partai-partai yang ada.

Kondisi tersebut justru menjadikan pemerintahan tidak stabil. Pertama adalah kabinet Natsir (1950-1951), kemudian kabinet Sukiman (1951-1952), dan kabinet Wilopo (1952-1953), ketiga kabinet yang terbentuk tersebut merupakan koalisi antara Masyumi-Partai Nasional Indonesia (PNI). Berikutnya dibentuk kabinet Ali Sastroamidjojo (1953-1955) yang merupakan koalisi PNI, Nahdlatul Ulama (NU), dan partai-partai kecil lain, dilanjutkan kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956) sebagai kabinet koalisi Masyumi, Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan NU, berganti lagi dengan kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua (1956-1957).

Berbagai kontroversi muncul dalam pengambilan kebijakan kabinet-kabinet tersebut. Tekanan publik dan politik dari partai-partai oposisi menjadi faktor utama pergantian kabinet. Salah satu puncak perpecahan terjadi bukan hanya di kabinet, namun merambat ke pucuk pimpinan negara, yakni ketika Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden pada 20 Juli 1956 (Ricklefs, 2005: 481-502).

Berakhirnya demokrasi Liberal ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kegagalan Kontituante menetapkan UUD membawa Indonesia ke tepi jurang kehancuran. Keadaan Negara yang telah dirongrong sejumlah pemberontakan menjadi bertambah gawat. Atas dasar pertimbangan menyelamatkan Negara dari

bahaya, Presiden Sukarno melakukan tindakan inkonstitusional. Tindakan presiden tersebut berupa pengeluaran dekrit yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Tindakan itu didukung oleh militer karena mereka sudah direpotkan oleh sejumlah pemberontakan akibat krisis politik. Lebih lanjut dekrit presiden 5 Juli dikeluarkan dengan berbagai pertimbangan diantaranya:

1. Anjuran untuk kembali kepada UUD 1945 tidak memperoleh keputusan dari Kontituante
2. Kontituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugasnya karena sebagian besar anggotanya telah menolak menghadiri sidang.
3. Kemelut dalam Kontituante membahayakan persatuan, mengancam keselamatan negara, dan merinangi pembangunan nasional (Matroji, 2002: 72 dalam Hakiki, 2014)

Sedangkan yang menjadi keputusan dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah:

- a. Konstituante dibubarkan
- b. UUD 1945 berlaku kembali sebagai UUD Republik Indonesia
- c. Membentuk MPRS dan DPAS dalam waktu singkat (Matroji, 2002: 72 dalam Hakiki, 2014).

Ada satu hal yang menarik untuk dikaji, bahwa sejak dikeluarkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959 ada fenomena sejarah bernegara Republik Indonesia mulai berkiblat ke negara Cina. Model pembangunan negeri Cina diyakini oleh Sukarno sebagai jalan alternatif modernisasi Indonesia yang berada di tengah pusaran Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Pada saat itu, Sukarno tampil sebagai pemain yang mengatur lalu lintas interaksi politik Indonesia-Cina di pentas global. Tidak tanggung-tanggung dalam pidato Sukarno yang bertajuk *To Build World A New, di New York, 30 September 1960* nama Cina diusulkan sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (Wibisono, 2018)

Pertimbangannya menurut Sukarno cukup realistis, Cina memiliki sejarah peradaban yang kuat dan memiliki daya kekuatan ekonomi politik sehingga sangat layak untuk diikutsertakan dalam perbincangan masalah dunia. Sukarno memberi tempat khusus bagi nasionalisme Asia yang salah satunya terwakili dalam pemikiran Sun Yat Sen. Sukarno berpendapat nasionalisme atas dasar "Roh Asia" sebagai eksemplar nasionalisme Ke-Timur-an yang berupaya mencari selamatnya manusia dan kesejahteraan sosial. Dalam tulisan berjudul *Indonesianisme dan Pan-Asiatisme* yang dirilis Suluh Indonesia Muda tahun 1928, Sukarno pernah

menuliskan munculnya kesadaran persatuan serta persaudaraan antara bangsa Indonesia dan Cina yakni sebagai sesama bangsa Timur, sesama bangsa yang sengsara dan berjuang menuntut kehidupan yang bebas (Wibisono, 2018). Melalui teks tersebut mulai bisa diraba garis politik luar negeri yang bakal dijalani oleh Sukarno semasa kepemimpinannya yaitu bersahabat dengan Cina.

Interaksi antara Indonesia-Cina saat era demokrasi terpimpin ini menarik sebab Cina justru tidak dilihat sebagai kehadiran negara komunis namun kedekatan geografis dan historis yaitu sesama bangsa Timur, kesamaan nasib yaitu pernah dijajah dan teladan etos kerja yang setidaknya berguna bagi negara-negara yang baru saja merdeka. Sukarno sebagai intelektual politik menjadikan Cina referensi model revolusi, sistem politik, penataan sosial-budaya dan solidaritas sesama bangsa. Cina sebagai perwakilan dari apa yang dinamakan membangun negara sesuai dengan karakter “Ke-Timur-an” (Wibisono, 2018). Cita-cita yang kemudian diwujudkan dalam istilah Poros Jakarta-Peking, Sukarno tertarik mempelajari pengalaman Cina dalam hal bagaimana menata formasi negara. Tahun 1956, setelah kunjungan pertamanya ke Cina sebagai Presiden Republik Indonesia, Sukarno mengambil contoh demokrasi Cina sebagai jawaban atas kacaunya Demokrasi Parlemerter (Wibisono, 2018). Kiranya wajar jika sebahagian sejarawan mensinyalir bahwa eksperimen politik dalam negeri yang dinamakan Demokrasi Terpimpin ini terinspirasi model kenegaraan dari pemimpin Cina, Mao Tse Tung yaitu kepemimpinan yang kuat.

Model kenegaraan semacam itu oleh Sukarno kemungkinannya dianggap ideal sebab merupakan kombinasi antara harmoni sosial, kepemimpinan ideologis, mobilisasi politik warganegara, serta kesatuan nasional. Benih gagasan ini mulai muncul saat Sukarno merilis pidato berjudul *Indonesia, Pilihlah Demokrasimu jang Sedjati* tahun 1956 dan dengan alasan mengembalikan elan revolusi Indonesia yang belum selesai dinyatakanlah pidato Menjelamatkan Republik Proklamasi: Konsep Bung Karno, tanggal 21 Februari 1957.

Pidato ini semacam kata pengantar menuju Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan periode Demokrasi Terpimpin. Inti utama naskah pidato ini adalah rencana untuk merombak struktur politik Indonesia yang semula Demokrasi Parlemerter menuju Demokrasi Terpimpin. Sukarno berpendapat demokrasi ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini bisa dicapai melalui pembentukan Kabinet Gotong Royong dan Dewan Nasional.

Format politik ini semakin mengeras saat idiom baru diperkenalkan dalam struktur kenegaraan

Indonesia yaitu Manipol Usdek (Manifesto Politik-UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia). Pelan-pelan haluan negara Indonesia memusatkan Sukarno panglima tertinggi politik Revolusi Indonesia hingga di akhir masa kekuasaannya tahun 1966. Setelah Sukarno jatuh dari kursi kekuasaan, gagasan yang melingkupi sosok Presiden pertama ini dilucuti dan dianggap “menyeleweng” dari ajaran Pancasila oleh Orde Baru. Segala inspirasi modernisasi Cina yang diserap Sukarno turut terinterupsi.

Kondisi ini semakin diperparah dengan Cina yang dituduh dalang peristiwa Gerakan 30 September sehingga berujung pada penyerbuan Kedutaan Besar Cina tahun 1966, sentimen anti-warga keturunan Tionghoa disusul pembekuan kegiatan diplomatik hingga awal 1990-an. Membicarakan gagasan Poros Peking-Jakarta yang sebenarnya sah-sah saja dalam khazanah sejarah Indonesia dianggap terlarang. Ironisnya, meski relasi diplomatik sudah dipulihkan antara Indonesia-Cina.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik melakukan penelitian dan penulisan tentang duplikasi dan modifikasi bernegara Cina oleh Indonesia pasca dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan judul “Orientasi bernegara Republik Indonesia Periode 1959-1965”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis. Metode historis digunakan karena penelitian ini mengambil objek dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Menurut Borg dan Gall dalam Djamal (2015: 103) Penelitian sejarah adalah penyelidikan secara sistematis terhadap dokumen dan sumber-sumber lain yang mengandung fakta tentang pertanyaan-pertanyaan sejarawan di masa lampau. Sementara itu menurut Wiersman dalam Djamal (2015: 103) penelitian sejarah adalah proses penyelidikan secara kritis terhadap peristiwa masa lalu untuk menghasilkan deskripsi dan penafsiran yang tepat dan benar tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Penelitian historis berupaya merekonstruksi tentang fakta di masa lampau tentang apa, siapa, kapan, di mana dan bagaimana secara obyektif, sistematis dan akurat yang dilaksanakan pada waktu sekarang. Proses rekonstruksi dilakukan berdasarkan hasil catatan-catatan di lapangan, artefak-artefak serta laporan-laporan verbal pelaku atau saksi sejarah.

Menurut Notosusanto (1984: 11) langkah-langkah dalam penelitian historis, yaitu:

1. Heuristik sebagai upaya proses mencari untuk menemukan sumber-sumber sejarah. Peneliti

mencoba mencari serta mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang diperlukan. Kegiatan heuristik juga difokuskan untuk mencari arsip-arsip dokumenter berkenaan haluan politik dan kedekatan hubungan antara Indonesia dan Cina periode 1959-1965 yang dilakukan di lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) secara online melalui *email* dan *WhatsApp*. Sumber dalam penelitian ini dibagi dalam sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer ialah kesaksian daripada seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indra yang lain, atau dengan alat mekanis seperti *tape recorder*, foto, dll. Sumber primer dapat disebut saksi pandangan. Sumber primer merupakan sumber asli dalam arti kesaksiannya tidak berasal dari sumber lain melainkan berasal dari pandangan pertama. (Hugiono dan Poerwantana, 1987: 32). Adapun sumber-sumber primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen kedekatan pemerintahan Sukarno dan terbitan-terbitan pers masa demokrasi terpimpin dan terdiri atas

Sumber sekunder ialah kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. Biasanya sejarawan harus bertumpu pada sumber sekunder yang berasal dari buku-buku tangan kedua sejarawan lain untuk memperoleh pengetahuan lain mengenai latar belakang yang diperlukan guna mengenali dokumen-dokumen sezaman. Suatu persyaratan untuk menggunakan sumber sekunder ini perlunya diuji dan dikoreksi dengan analisa kritis terhadap kesaksian dokumen-dokumen sezaman untuk menghindari dokumen yang palsu dan menyesatkan (Hugiono dan Poerwantana, 1987: 32).

2. Kritik Sumber untuk mengetahui apakah sumber sejarah yang diperoleh sebagai hasil dari proses heuristik yang sudah dilakukan adalah otentik dan benar dibutuhkan untuk ketersediaan data pendukung di dalam penulisan ini.

Kritik Sumber yang dilakukan menempuh dua langkah kerja, yaitu:

- a. Kritik Intern, sebagai langkah upaya untuk mengetahui otentisitas dari sumber sejarah yang diketemukan dari segi materialnya (bendanya), yang meliputi wujud fisiknya, bahasa dan ejaan nya, tanda legalitas seperti stempel maupun tanda tangan pengesahnya, yang kesemuanya harus mewakili konten material sejaman dengan peristiwa yang diteliti.
- b. Kritik Ekstern, sebagai langkah upaya untuk mengetahui apakah data-data sejarah yang termuat di dalam sumber sejarah yang sudah

lolos kritik intern adalah data-data yang benar-benar sesuai untuk dapat dipergunakan di dalam penelitian ini sesuai dengan tema dan masalah yang diketengahkan.

3. Interpretasi, adalah kegiatan yang dilakukan setelah mendapatkan fakta-fakta sejarah. Fakta sejarah adalah data-data dalam sumber sejarah yang sudah lolos kritik sumber intern dan kritik sumber ekstern, untuk kemudian merangkaikannya secara kronologis berdasarkan korelasi kausalitas hingga menjadi satu rangkaian kisah sejarah yang masuk akal.
4. Historiografi, adalah kegiatan penyajian kisah sejarah ke dalam wujud tulisan sejarah dengan mempergunakan pendekatan (frame) perspektif yang diajukan oleh sejarawan. Berkenaan bahwa dalam hal ini penulis adalah selaku penulisnya, maka sajian historiografi yang diperoleh dikemas dalam bentuk skripsi hasil penelitian sejarah.

Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang sesuai dengan masalah yang penulis teliti maka peneliti menggunakan:

Teknik Dokumentasi

Kartodirdjo (1982) mengungkapkan bahwa kunci untuk memasuki wilayah sejarah ialah sumber-sumber seperti legenda, folklor, prasasti, monumen hingga dokumen-dokumen, surat kabar, dan surat-surat. Kesemua yang disebutkan di atas merupakan rekaman aktivitas manusia. Menurut Lohanda (1998: 4), dari segi kedudukan sebagai sumber sejarah, yaitu sebagai bahan yang digunakan dalam penelitian untuk penulisan sejarah, arsip memperoleh tempatnya yang pertama. Dengan teknik Dokumentasi semua sumber-sumber primer untuk memasuki wilayah sejarah dapat dipenuhi. Teknik Dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan sumber-sumber primer sezaman tersebut. Dalam penelitian ini sumber primer didapatkan melalui teknik dokumentasi yakni dengan mengumpulkan dokumen-dokumen sezaman pada masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965. Adapun dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumen-dokumen kedekatan pemerintahan Sukarno pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959-1965 yang terdapat di Arsip Nasional Republik Indonesia. Peneliti memperoleh dokumen-dokumen ini secara online melalui *email* dan *WhatsApp*.

Teknik Kepustakaan

Teknik kepastakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau sumber-sumber data yang diperlukan dari perpustakaan, yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur yang berkaitan

dengan masalah yang akan penulis teliti. Koentjaraningrat menyatakan bahwa studi pustaka merupakan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan misalnya, koran, naskah, majalah, catatan-catatan, kisah sejarah, sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1983: 420). Mengingat pentingnya teknik kepustakaan ini, maka melalui studi pustaka ini penulis berusaha mengumpulkan berbagai macam informasi yang menunjang dalam penyelesaian masalah, selain itu melalui studi pustaka ini terdapat teori-teori atau pendapat-pendapat para ahli yang akan dapat dianalisis oleh penulis dan akan dijadikan landasan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab diterapkannya Demokrasi Terpimpin

Faktor penyebab diterapkannya demokrasi terpimpin akan ditinjau dari faktor penarik dan faktor pendorong. Faktor pendorong lahir dari dalam keadaan bangsa Indonesia dan dari dalam diri seorang Pemimpinnya saat itu, yakni Sukarno. Keadaan bangsa Indonesia yang saat itu berada dalam demokrasi Parlementer menuai kegagalan, sistem pemerintahan yang multipartai dan pergantian kabinet dalam waktu yang singkat menjadikan pemerintahan tidak stabil. Sistem pemerintahan Parlementer dinilai terinspirasi dari Belanda, dengan demikian Sukarno menilai Indonesia belum sepenuhnya lepas dari pengaruh kolonialisme dan imperialisme (Ricklefs, 2005: 480-481). Sukarno kemudian mencari alternatif baru untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan jauh dari pengaruh imperialisme serta kolonialisme. Faktor pendorong lainnya terdapat pada faktor eksternal sebagai pembentuk karakter dan perilaku politik Sukarno sebagai presiden yang memimpin sebuah negara dengan penentu kebijakannya.

Faktor dari dalam diri Sukarno sebagai presiden yang menjadikan ia memiliki perkembangan anti imperialisme dan kolonialisme terlihat dari didikan orang tuanya, terutama ayahnya Raden Sukemi yang seorang teosof yang menyayangi makhluk hidup dan mengajarkan prinsip "*Tat Twan Asi, Tat Twam Asi*", yang artinya "Dia adalah Aku dan Aku adalah Dia; Engkau adalah Aku dan Aku adalah Engkau". Tak heran jika Sukarno juga menjadi orang yang begitu menyukai makhluk hidup (Soyomukti, 2008: 69). Ketika Sukarno mendapatkan realitas ketimpangan dan diskriminasi penjajahan dengan penglihatannya sendiri membuat ia menjadi seorang yang sentimental terhadap penjajahan Belanda. Diskriminasi yang dilihat Sukarno berupa

ketidaksengajaan yang dilihat ketika berjalan-jalan dan menemukan kalangan rakyat miskin, ketika di sekolah ia mendapatkan perlakuan yang berbeda dan mendapatkan hinaan dari teman-temannya hanya karena ia seorang inlander (Soyomukti, 2008: 73-74).

Faktor lainnya adalah pembelajaran yang didapat dari belajar otodidak dengan membaca buku-buku dan mendengarkan ceramah dari pak Cokro saat ia berada di Surabaya untuk bersekolah di HBS (Hoogere Burger School). Pak Cokro yang dikenal banyak orang dengan nama Haji Oemar Said Cokroaminoto adalah seorang yang disegani oleh para pemuda dan aktivis buruh, beliau adalah Ketua Sarekat Islam. Selama berada di Surabaya, Sukarno banyak belajar dari beliau pak Cokro kemudian memberikan Sukarno buku-bukunya, dan dari buku-buku itulah Sukarno mengenal nama-nama orang yang besar pemikirannya dan semangat juangnya. Bahkan ia seakan menjadi dekat atau bersahabat dengan tokoh-tokoh yang dibacanya itu. Pemikiran yang masuk kedalam otak Sukarno juga didapat dariberdiskusi dengan pak Cokro saat makan malam, mereka membicarakan mengenai penjajahan dan sistem ekonomi yang mengendalikan terjadinya penjajahan. Dari diskusi itu, Sukarno juga mendengar pendapat-pendapat aktivis yang kelak dikenal sebagai kaum kiri, yakni Alimin dan Muso yang begitu pandainya menguliri terjadinya kolonialisme dan mengusulkan cara melawan penjajah Belanda. Dari situlah Sukarno belajar mengenai ilmu-ilmu sosial meskipun sebenarnya ia adalah seorang sarjana teknik (Soyomukti, 2008: 70-73).

Faktor dari dalam diri Sukarno yang menjadikan Sukarno orang yang sentimental terhadap penjajahan Belanda dan telah mendapatkan pembawaan dari ayahnya untuk menyukai makhluk hidup semakin diperkuat dengan pembelajran-pembelajran yang Sukarno dapatkan selama berada di Surabaya tepatnya dirumah HOS Cokroaminoto bersama dengan Alimin dan Muso yang bersemangat untuk melawan penjajahan dan mengusulkan perlawanan. Kemudian saat Sukarno tinggal di Bandung Sukarno menemukan banyak inspirasi, yang paling penting adalah penemuan ideologisnya yang kemudian dikenal dengan Marhaenisme, yang terinspirasi oleh pertemuannya dengan petani Sunda saat jalan-jalan. Ia menjadi mahasiswa sekaligus aktivis yang pemikirannya semakin terarah (Soyomukti, 2008: 78).

Saat memimpin Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Sukarno bersikeras untuk lepas dari pengaruh imperialisme dan kolonialisme. Hal ini terbukti dari sifat-sifat yang ditunjukkan Sukarno saat membawakan pidato dan pikiran-pikiran yang lahir dari pembelajarannya. Sukarno adalah seorang

yang banyak belajar dari revolusi-revolusi yang terjadi di luar negeri dan berkeinginan kuat untuk merevolusi Indonesia, hal ini tertuang dalam pernyataan berjudul “Revolusi hanya dapat dimenangkan dengan gilang-gemilang kalau kita satu”. Sukarno menyatakan Tiada revolusi tanpa teori revolusioner, kaum jurist harus berpikir satu. Presiden Sukarno memperingatkan, bahwa hanya bila kita satu dan bersatu, kita akan dapat menyelesaikan revolusi nasional kita dengan gilang gemilang. Ini dinytakan oleh presiden dalam amanatnya didepan Kongres pertama dari PERSAHI (Persatuan Ahli Hukum Indonesia) di Yogyakarta. Presiden memperingatkan, bahwa revolusi itu seperti dikatakan oleh Lenin tidak seluruh jalan-*raya Newski Prospect* di Leningrad atau seperti dikatakan oleh Stalin ia berjalan secara zigzag. Apa yang jelas adalah tujuan revolusi, tetapi jalannya tidak dapat ditentukan sekarang bagaimana ia besok, apakah akan abang, kemudian hitam dan kuning. Presiden Sukarno mensitir Lenin yang mengatakan, bahwa “tiada suatu revolusi tanpa teori revolusioner”, teori revolusioner itu adalah teori yang flexible, tidak beku. Karena itu Presiden Sukarno menganjurkan supaya kaum Yurist dapat menyesuaikan dengan revolusi dan jangan berpikir beku (Koti no 4).

Sukarno secara terbuka dan terang-terangan menentang hukum-hukum kolonial yang pernah diberlakukan di Indonesia dan mendorong Indonesia harus memiliki kepribadian sendiri, hal ini tertuang dalam pernyataan “bicara selanjutnya tentang revolusi kita Presiden Sukarno mengatakan, bahwa tiadalah suatu bangsa bisa hidup langgeng kalau tidak bersandar dan hidup atas kepribadian sendiri. Demikianlah maka kita pun haruslah mempunyai hukum sendiri yang bersandar kepada kepribadian sendiri, bukanlah melanjutkan hukum-hukum kolonial yang masih berlaku. Presiden kemudian menjelaskan kenapa beliau selalu mengajak seluruh bangsa Indonesia supaya terus menggali, menemukan diri kita sendiri. Hasil dari penemuan diri sendiri itu antara lain menurut Presiden Sukarno, adalah penemuan Pancasila, Manipol, Undang-Undang Dasar 1945 dll. Adapun karena ini semua diterima oleh bangsa kita, tiadalah-lain karena ia memang sesuai dengan kepribadian Indonesia (Koti no. 4). Sedangkan faktor penarik dari Cina adalah karena Ketika Sukarno pertama kali mengunjungi Cina pada tahun 1956, dia sudah akrab dengan perkembangan politik dan sosial Cina. Dia sudah lama menyadari pentingnya Cina, dan ia mengatakan pada tahun 1930, “Barangsiapa memegang lingkungan Cina akan mengendalikan urusan dunia Timur seluruhnya” (Paget, 1975 dalam Liu, 2015: 217).

Cina menjadi bahan konseptual dan praktis yang menginspirasi Sukarno dalam usahanya untuk mengubah program pembangunan sosial-politik di Indonesia tahun 1956-1965, khususnya antara tahun 1956 dan 1959. Ketika ditanya apakah sistem sosial dan politik Indonesia pada tahun 1959 meniru kepada beberapa negara yang mempraktikkan Demokrasi Terpimpin (Liu, 2015: 243).

2. Penerapan Demokrasi Terpimpin di Indonesia

Presiden Sukarno menyatakan bahwa kepribadian sendiri bangsa Indonesia itu adalah Sosialisme, kepribadian Indonesia itu bukan hanya saat ini saja tetapi sudah ada sejak berabad-abad, bangsa Indonesia itu telah mempunyai cita-cita Sosialisme, namun sosialisme yang sesuai dengan keadaan waktu itu bukanlah sosialisme modern. Sukarno meyakinkannya dengan tulisan tulisan yang ada mengenai sejarah Cina, yang didalamnya disebutkan keadaan kerajaan Sriwijaya, Kalingga dll. tentang cita-cita Sosialisme ini. Sosialisme itu kemudian hancu akibat imperialisme yang masuk Indonesia pada abad ke-16, terutama pada abad ke-17. Sukarno kemudian memberikan peringatan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berevolusi, negara itu hanyalah alat untuk mencapai tujuan dan tujuan kita adalah pelaksanaan amanat penderitaan rakyat, yaitu sosialisme (Koti no. 4 : 2).

Menurut D.N Aidit kepada pegawai-pegawai tinggi Departemen pertanian dan Agraria, tahun 1926 Sukarno menulis artikel dengan judul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme, yang dapat dianggap sebagai permulaan lahirnya gagasan Nasakom. Dalam membahas Nasionalisme jelas yang dimaksud bung Karno adalah Partai Nasionalis, Islam adalah Partai Politik Islam, dan Marxisme adalah PKI. Dalam merealisasi gagasan Nasakom nung karno konsekuen dengan pendiriannya dulu, yaitu tidak memisahkan gagasan Nasakom dengan PNI, NU, PKI dan dengan partai lainnya. Gagasan Nasakom adalah gagasan untuk menghimpun segenap kekuatan revolusioner, kekuatan politik revolusioner tidak mungkin dipisahkan dari partai-partai politik revolusioner baik menurut kenyataan sejarah maupun kenyataan saat ini (Koti no 386 : 3-4).

Pengakuan Soekarno terhadap marxisme kian terlihat kuat setelah tahun 1959, dimana kebencian Soekarno terhadap kolonialisme yang menguasai hampir sebagian besar negara-negara berkembang di Asia, kian memuncak, hal ini dipicu oleh terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia lewat Soekarno memutuskan keluar dari keanggotaan PBB dan membentuk poros politik baru bernama Poros

Jakarta-Peking yang kemudian membuat Indonesia lebih cenderung memihak ke blok timur dan dekat dengan Negara-negara komunis saat itu. Selain kedekatan Indonesia dengan Negara-negara komunis seperti Rusia dan China, hubungan Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) pun kian harmonis (Cenne, 2016: 7).

3. Risiko yang muncul dalam Kehidupan Bernegara Indonesia

Keluarnya Republik Indonesia dari PBB otomatis memutuskan hubungan Indonesia dengan lembaga-lembaga PBB, dan setiap tahun sidang PBB yang diadakan Sukarno dengan tegas menolak Imperialisme dan kolonialisme terjadi kembali didunia, dengan keluarnya Indonesia dari PBB serta mendeklarasikan berdirinya Conefo, secara langsung Sukarno sudah menyatakan penyamaan kekuatan yang dibentuknya dengan PBB, dengan demikian pembentukan blok baru ini akan mengasingkan Indonesia dengan negara-negara lain didunia Internasional dan hanya akan bekerja sama dengan negara-negara anggota Canefo tersebut.

Peristiwa G30S, yang terjadi beberapa bulan usai Indonesia keluar dari PBB, ternyata menjadi bibit pengembosan kekuasaan Sukarno. Paul Lashmar dan James Oliver mencatat di bukunya, *Britain's Secret Propaganda War 1948-77*, bahwa Inggris juga punya peran besar dalam upaya tersebut. Tujuannya sederhana: penguasaan sumber daya alam Indonesia melalui jalur investasi asing—sesuatu yang amat susah direalisasikan selama Sukarno berkuasa. Dua tahun usai tragedi pembantaian ratusan ribu (ada yang menyebut jutaan) anggota PKI dan yang tertuduh lain, cita-cita Inggris berhasil: MPRS mencabut status Sukarno dan Soeharto dilantik sebagai presiden RI yang baru. Melalui sebuah pesan tertulis kepada Sekjen PBB tanggal 19 September 1966, Indonesia menyatakan keinginannya untuk kembali jadi anggota PBB. Keinginan ini disambut hangat sidang Majelis Umum PBB yang digelar pada 28 September 1966. Perwakilan Indonesia kembali aktif di markas PBB. Bantuan internasional kembali mengalir ke Indonesia—plus beragam investasi asing dari Inggris dan negara-negara “nekolim” lainnya (Hasan, 2018).

4. KESIMPULAN

Sukarno sebagai presiden adalah seorang yang banyak belajar dari revolusi-revolusi yang terjadi di luar negeri dan berkeinginan kuat untuk merevolusi Indonesia, Sukarno secara terbuka dan terang-terangan menentang hukum-hukum kolonial yang pernah diberlakukan di Indonesia dan mendorong

Indonesia harus memiliki kepribadian sendiri. Faktor pembentuk perilaku politik Sukarno didapat dari belajar otodidak dengan membaca buku-buku dan mendengarkan ceramah dari pak Cokro saat ia berada di Surabaya untuk bersekolah di HBS (*Hoogere Burger School*). Pemikiran yang masuk kedalam otak Sukarno juga didapat dari berdiskusi dengan pak Cokro saat makan malam, mereka membicarakan mengenai penjajahan dan sistem ekonomi yang mengendalikan terjadinya penjajahan. Faktor lainnya juga terlihat dari didikan orang tuanya, terutama ayahnya Raden Sukemi yang seorang teosof yang menyayangi makhluk hidup. Kunjungan Sukarno ke Cina memberikan inspirasi tersendiri bagi Sukarno untuk merevolusi negerinya karena melihat pembangunan Cina yang maju berkat sosialisme dalam masyarakatnya.

Sukarno menerapkan Demokrasi Terpimpin dan Nasakom saat demokrasi liberal dinilai sudah tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sistem politik yang baru ini ditandai dengan tiga pengaturan kelembagaan utama.

Risiko yang timbul dalam kehidupan bernegara Indonesia setelah diterapkannya Demokrasi Terpimpin adalah Indonesia menjadi negara yang berkiblat dan belajar dari Cina serta menentang kolonialisme dan imperialisme namun disisi lain pada masa ini Indonesia mengalami keterasingan dari dunia Internasional oleh sebab pembentukan dunia baru Oldefo dan Nefo serta Konfrontasi Malaysia yang akhirnya menjadikan Indonesia keluar dari PBB. Beberapa bulan setelah keluar dari PBB peristiwa G30S terjadi di Indonesia dan menjadi bibit pengebosan Sukarno.

DAFTAR PUSTAKA

- Cenne, A.A. (2016). Pemikiran Politik Soekarno tentang Nasakom rentang 1959-1966. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
- Djamil. (2015). *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakiki, P. (2014). *Sistem Pemerintahan Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1949-1959* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Hasan, A.M. (2018, 7 Januari). Gara-gara Malaysia, Indonesia Keluar dari PBB. Diakses 17 Desember 2020 dari <https://tirto.id/gara-gara-malaysia-indonesia-keluar-dari-pbb-cCpg>.
- Hugiono & Poerwantana. (1987). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kartodirdjo, S. (1982). *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat. (1983). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

- Komando Operasi Tertinggi (Koti) Nomor Arsip 4: Artikel mengenai pidato Presiden Soekarno tentang revolusi yang dikutip dari Harian Bintang Timur. 27 Nopember 1961.
- Liu, H. (2015). *Sukarno, Tiongkok dan Pembentukan Indonesia 1949-1965*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Lohanda, M. (1998). *Sumber Sejarah dan Penelitian Sejarah*. Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian UI.
- Notosusanto, N. (1984). *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Inti Indayu.
- Ricklefs, M. C. (2005). *Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004*. Jakarta: Serambi.
- Ricklefs, M. C. (2005). *Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004*. Jakarta: Serambi.
- Soyomukti, N. (2008). *Soekarno dan Nasakom*. Jakarta : Garasi.
- Subkhan, E. (2018). Ideologi, Kekuasaan, Dan Pengaruhnya Pada Arah Sistem Pendidikan Nasional Indonesia (1950-1965). *Journal of Indonesian History*, 7(1). 19-34.
- Suradi, Safwan, M., Latuconsina, D., & Samsurizal. (1986). *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Wibisono, H. (2018, 30 Juni). Pada Suatu Masa Soekarno dan Poros Tiongkok. Diakses 18 Maret 2020, dari <https://geotimes.co.id/opini/pada-suatu-masa-soekarno-dan-poros-tiongkok/>.